

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN RESOLUSI KONFLIK DAN SIKAP DEMOKRASI TERHADAP HASIL BELAJAR PKn SISWA KELAS VII SMP NEGERI 4 NEGARA – BALI

Intan Arieyanti, I Wayan Lasmawan, A.A.I.N Marhaeni

Program Studi Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

Email : intan.arieyanti, wayan.lasmawan,
agung.marhaeni@pasca.undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh model pembelajaran resolusi konflik dan sikap demokrasi terhadap hasil belajar PKn siswa kelas VII SMP Negeri 4 Negara – Bali. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan rancangan penelitian *post test only control group design* yang dilakukan di SMP Negeri 4 Negara. Sampel penelitian ditentukan secara *random sampling*. Data dikumpulkan dengan menggunakan tes dan kuisioner. Keseluruhan data dianalisis dengan Anava dua jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model resolusi konflik dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model konvensional, (2) terdapat pengaruh interaksi antara penggunaan model pembelajaran resolusi konflik dan sikap demokrasi terhadap hasil belajar PKn pada siswa kelas VII SMP Negeri 4 Negara – Bali, (3) terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model resolusi konflik dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model konvensional, pada siswa yang memiliki sikap demokrasi tinggi, dan (4) terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model resolusi konflik dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model konvensional, pada siswa yang memiliki sikap demokrasi rendah.

Kata kunci : model pembelajaran resolusi konflik, sikap demokrasi, hasil belajar, PKn

Abstract

The Effect of conflict resolution learning model and democratic attitudes on learning achievement of seventh grade students of SMP Negeri 4 Negara – Bali. This study is an experimental study conducted in SMP Negeri 4 Negara. The research sample is determined by using random sampling. The data were collected by using questionnaires and tests. The data were analyzed by using two-way Anava. The results show that : (1) there is a difference of learning achievement between students taking conflict resolution model and the students taking conventional model, (2) there is an interaction effect between the use of conflict resolution model and democratic attitudes toward civic learning achievement on the seventh grade students of SMP Negeri 4 Negara, (3) there is a difference of civic learning achievement between students taking conflict resolution model and the students taking conventional model for students who have high democratic attitudes, and (4) there is a difference of civic learning achievement between students taking conflict resolution model and the student taking conventional model for students who have low democratic attitudes.

Key words : models of conflict resolution, democratic attitudes, learning outcomes, civic education.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang ini hanya bangsa-bangsa yang memiliki kualitas tinggi yang mampu bersaing di kancah dunia pasar bebas. Oleh karena itu pendidikan sebagai wahana untuk mengembangkan potensi menuju kehidupan yang layak harus mampu mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang akan membangun bangsa ini lebih bermartabat di dunia internasional dan tidak menjadi budak di negeri sendiri. Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk memanusiakan manusia, sehingga dalam *konstelasi* kehidupan social, manusia harus mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga menjadi pribadi yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah selaku pengambil kebijakan melakukan perbaikan dalam system pendidikan, sehingga pendidikan di negeri ini tidak menjadi terbelakang dari bangsa-bangsa lain. Dalam kurikulum 2006 yang tetap mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Pada tataran kurikulum nasional, salah satu mata pelajaran wajib yang mesti diberikan di jenjang SMP adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan kebutuhan bagi setiap bangsa bila ingin membangun insan negara yang mampu berdemokrasi secara lebih baik. Keberhasilan pendidikan demokrasi banyak di pengaruhi oleh kualitas pendidikan yang dilakukan oleh sekolah. Namun tidak semua bangsa dan negara mampu menjamin kualitas pendidikannya selalu baik, seperti halnya dengan negara Indonesia saat ini. Rendahnya kualitas proses dan hasil pendidikan merupakan masalah yang sangat mendasar karena berdampak langsung terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya

menghambat proses pembangunan nasional. Di sisi lain bangsa Indonesia harus mampu melaksanakan pembangunan nasional secara maksimal untuk mengejar ketinggalannya. Khusus dalam bidang pendidikan, masalah rendahnya proses dan hasil pendidikan formal harus diupayakan untuk dicarikan solusi lewat peningkatan kualitas proses pembelajaran, melalui peningkatan kompetensi guru, peningkatan sarana teknis pembelajaran seperti penerapan media pembelajaran yang relevan, serta peningkatan faktor persoalan kompetensi siswa.

Lembaga sekolah sebagai media pendidikan formal memiliki tanggung jawab untuk membentuk generasi muda yang beriman, bertaqwa, berilmu, bermoral, dan memiliki sikap demokratis. Secara khusus mata pelajaran PKn sebagai media pendidikan siswa dalam bernegara telah berusaha untuk menanamkan nilai, norma, dan moral, kepada peserta didik dengan tujuan agar memiliki pengetahuan tentang hukum, politk, moral, dan sikap demokratis.

Salah satu alternative yang dipandang mampu mengurangi abrasi moral dan nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda dalam konteks pendidikan formal dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn di tengah-tengah kehidupan masyarakat global adalah melalui fasilitas iklim pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal sambil melatih ketrampilan berpikir dan sosialnya selama berlangsungnya pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dipandang mampu mengakomodasi hal itu adalah model resolusi konflik.

Berangkat dari kajian empiris dan konseptual tentang permasalahan pembelajaran PKn seperti yang digambarkan di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada pengujian model pembelajaran PKn yang mampu memecahkan berbagai ketimpangan tersebut. Salah satu model pembelajaran yang di duga dapat memecahkan permasalahan terkait pembelajaran PKn tersebut adalah model resolusi konflik. Model ini menawarkan sejumlah solusi kepada guru untuk menjadikan pembelajaran itu menarik, berkualitas baik secara proses maupun produknya, dan bermakna bagi peserta didik,

seperti : bagaimana merancang program pembelajaran yang berorientasi pada siswa, bagaimana mengelola kelas agar pembelajaran berlangsung secara aktif dan interaktif, bagaimana memberikan layanan belajar, dan bagaimana melakukan evaluasi pembelajaran yang komprehensif, sehingga mampu mengukur dan menilai keberhasilan siswa selama berlangsungnya pembelajaran secara benar dan sebenarnya.

Tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh model pembelajaran resolusi konflik dan sikap demokrasi terhadap hasil belajar PKn siswa kelas VII SMP Negeri 4 Negara – Bali. Tujuan pokok tersebut dapat dirinci lagi menjadi beberapa tujuan khusus penelitian, yaitu : (1) untuk mengetahui perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model resolusi konflik dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model konvensional, (2) untuk mengetahui pengaruh interaksi antara penggunaan model pembelajaran resolusi konflik dan sikap demokrasi terhadap hasil belajar PKn siswa kelas VII SMP Negeri 4 Negara, (3) untuk mengetahui perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model resolusi konflik dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model konvensional pada siswa yang memiliki sikap demokrasi tinggi, dan (4) untuk mengetahui perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model resolusi konflik dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model konvensional pada siswa yang memiliki sikap demokrasi rendah.

Penelitian ini penting, mengingat Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi azas demokrasi, senantiasa berupaya membangun nilai-nilai demokrasi tersebut melalui pembelajaran PKn. Pendidikan Kewarganegaraan sangat mendesak sifatnya karena kehidupan moral dan rasa toleransi mulai memudar. Kita tidak menginginkan semua itu terjadi, oleh karenanya kita tidak memerlukan mata pelajaran baru. Kita menginginkan semua guru agar berperan serta dalam menanamkan rasa kebangsaan dan moral yang tinggi, untuk mencapai tujuan pendidikan sebenarnya yang dilakukan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar. Hal ini semakin penting, mengingat saat ini

bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada persoalan integritas kebangsaan dan abrasi nilai-nilai idologisnya, yaitu Pancasila.

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang member kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur . bahwasanya Pancasila yang telah di terima dan ditetapkan sebagai dasar Negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah di uji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang tidak mungkin terlepas dari rasa kekeluargaan. Akan tetapi yang menjadi pandangan kita sekarang. Mengapa Negara ini seperti mengalami kesulitan besar dalam melahirkan demokrasi. Banyak para ahli berpendapat bahwa demokrasi Pancasila itu merupakan salah satu demokrasi yang mampu menjawab tantangan zaman karena semua kehidupan berkaitan erat dengan nilai luhur Pancasila. Dalam buku *“Le Contract Social”*, Jean Jacques Rousseau (Lasmawan, 2012), memaparkan bahwa penguasa atau pemerintah telah membuat perjanjian dengan rakyatnya yang disebut dengan istilah kontrak sosial. Dalam sebuah republic demokrasi, kontrak social atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam sebuah pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi yang selanjutnya menentukan masa depan sebuah Negara.

Untuk merealisasikan hal tersebut, maka pembelajaran PKn mestinya diarahkan pada pengkondisian dan pelatihan siswa untuk mampu menjadi warga Negara yang terampil. Banyak model yang bisa dikembangkan, salah satunya adalah model resolusi konflik (MRK). Model pembelajaran resolusi konflik adalah suatu model pembelajaran yang didasari oleh suatu pandangan bahwa ada hubungan kausalitas antara fenomena social, budaya dan kemampuan serta tanggung jawab social individu bagi kehidupan masyarakat secara siklus yang pada akhirnya membuat kehidupan manusia lebih baik dan mapan di tengah-tengah keharmonisan (Lasmawan, 2012). Dalam pendekatan model resolusi konflik (MRK) sebagai sebuah pendekatan pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu gerakan revolutif yang interdisipliner dalam pembelajaran civic, yang dikembangkan untuk menstimulasi dan eksplorasi hubungan antara masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang dalam balutan konflik yang multidimensi, sehingga setiap orang berkewajiban memiliki pengetahuan dan ketrampilan menyelesaikan konflik yang ada di masyarakatnya bagi kesejahteraan umat manusia.

Adapun yang menjadi tujuan MRK sebagaimana yang dikemukakan oleh NCSS (Suka Darmasada, 2010), dalam membantu perkembangan peserta didik yaitu untuk : 1) menyadari hubungan-hubungan yang kompleks yang ada di antara manusia dan masyarakat serta fenomena alamiah, khususnya konsekwensi-konsekwensi jangka pendek dan jangka panjang dari meluas dan kompleksnya konflik social local, regional, nasional, dan global, 2) memahami dan mengadaptasi secara lebih baik perubahan-perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari benturan social budaya di masyarakat, di mana keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan manusia, merupakan sesuatu yang telah menjadi kebutuhan setiap insane di muka bumi, sehingga wajib hukumnya untuk sekolah membelajarkan hal tersebut, 3) mengetahui dengan baik dan terampil dalam mengambil keputusan-keputusan social dan moral yang berkaitan dengan pemanfaatan unsur budaya dalam kehidupan masyarakat, karena hal tersebut berkenaan dengan berbagai

permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat, seperti pencemaran lingkungan, transportasi, abrasi moral-budaya, nilai hidup, nilai-nilai *transcendental*, dan perkembangan masyarakat, 4) secara realistic dapat memproyeksikan masa depan alternative dan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi positif dan negatifnya berdasarkan nilai-nilai luhur kebudayaan, filosofi bangsa, dan konvensi nilai global, 5) dapat bekerja sesuai dengan masa depan yang diinginkan dan adil bagi semua manusia dengan dilandasi oleh nilai-nilai kebudayaan yang luhur serta di bekali dengan seperangkat kemampuan dan ketrampilan dalam menyikapi dan menyelesaikan konflik-konflik social di masyarakat. Melalui penerapan model ini, diharapkan siswa akan memperoleh pengalaman riil selama pembelajaran sebagai pembekalan kepada mereka untuk menjadi warga Negara yang baik bagi bangsanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimen dalam bentuk *Post Test Only Control Group Design*, dengan rancangan factorial 2 x 2. Penelitian ini melibatkan tiga variable yang terdiri dari dua variable bebas dan satu variable terikat. Variable bebas pertama adalah model pembelajaran resolusi konflik (A) sebagai variable perlakuan; variable bebas kedua adalah : sikap demokrasi (B) sebagai variable moderator; sedangkan variable terikatnya adalah hasil belajar PKn. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Negara – Bali. Populasi penelitian meliputi seluruh siswa VII yang ada di SMP Negeri 4 Negara – Bali, pada semester genap tahun pelajaran 2012/2013. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan *Random Sampling*. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan dua instrument, yaitu : 1) tes hasil belajar PKn, dan 2) kuisioner sikap demokrasi. Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis varians (Anava) dua jalur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh ringkasan skor hasil belajar PKn siswa kelas VII SMP Negeri 4 Negara untuk

seluruh kelompok data adalah sebagai berikut :

Model Pembelajaran(A) Sikap Demokrasi	Resolusi Konflik (A1)	Konvensional (A2)
Tinggi (B1)	n = 22 \bar{X} = 33,09 s = 2,18	n = 22 \bar{X} = 27,00 s = 3,21
Rendah (B2)	n = 22 \bar{X} = 27,77 s = 2,62	n = 22 \bar{X} = 30,32 s = 2,03
Total	n = 44 \bar{X} = 30,43 s = 3,59	n = 44 \bar{X} = 28,66 s = 3,14

Keterangan :

- n = jumlah sampel dalam tiap sel
- \bar{X} = skor rata-rata hasil belajar PKn
- s = standar deviasi

Hasil penghitungan dengan Anava dua-jalur menghasilkan ringkasan sebagai berikut :

Sumber Varians	db	JK	RJK	F hitung	p	Keterangan
Antar A	1	69.136	69.136	10.628 *	0.020	Signifikan
Antar B	1	22.000	22.000	3.382	0.069	
Inter AB	1	410.227	410.227	63.059 *	0.000	Signifikan
Dalam	116	546.455	6.505			
Total	120	7786.600				

Keterangan :

- JK = jumlah kuadrat ;
- Db = derajat kebebasan ; dan
- RJK = rata-rata jumlah kuadrat.

Berdasarkan data tersebut, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian hipotesis. Pengujian **hipotesis pertama** : terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran resolusi konflik dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan konvensional. Berdasarkan hasil penghitungan anava dua jalur di peroleh nilai Fhitung = 10,628 sedangkan Ftabel dengan dbA = 1 dan dbdalam = 84 untuk taraf

signifikansi 5% = 3,96. Ini berarti nilai Fhitung lebih besar dari pada Ftabel (Fh = 10,628 > Ftabel(1:84) = 3,96). Karena itu, Ho ditolak dan Hi diterima. Ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar PKn kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model resolusi konflik dan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional. Hasil penghitungan Anava juga menunjukkan bahwa kelompok siswa yang mengikuti pelajaran dengan model resolusi konflik (A1) memiliki skor rata-rata hasil belajar PKn siswa sebesar 30,43 sedangkan kelompok yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional (kelompok A2) memiliki skor rata-rata hasil belajar PKn sebesar 28,66. Karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil belajar PKn kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model resolusi konflik lebih tinggi daripada hasil belajar PKn siswa kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional.

Dari hasil penelitian diatas sekaligus membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara penerapan model resolusi konflik dan penerapan penilaian konvensional terhadap hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan.

Karena terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran resolusi konflik dan sikap demokrasi siswa dengan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar PKn siswa kelas VII SMP Negeri 4 Negara maka hasil pengujian **hipotesis kedua** berbunyi : terdapat pengaruh interaksi antara penggunaan model pembelajaran resolusi konflik dan sikap demokrasi terhadap hasil belajar PKn pada siswa kelas VII SMP Negeri 4 Negara – Bali. Pengujian **hipotesis ketiga** yang berbunyi : terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran resolusi konflik dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model konvensional, pada siswa yang memiliki sikap demokrasi tinggi. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa rata-rata skor hasil belajar PKn kelompok siswa yang memiliki sikap demokrasi tinggi dan mengikuti pembelajaran dengan model resolusi konflik (kelompok A1B1) adalah sebesar 33,09. Rata-rata skor hasil belajar PKn kelompok siswa yang memiliki sikap demokrasi tinggi dan

mengikuti pembelajaran dengan model konvensional (kelompok A2B1) adalah sebesar 27,00 sedangkan rata-rata jumlah kuadrat (RJKd) adalah sebesar 6,505. Perhitungan dengan uji Tukey menunjukkan nilai Q_{hitung} sebesar 11,201, sedangkan nilai Q_{tabel} pada taraf signifikansi 0,05 sebesar 2,94. Hasil tersebut menunjukkan nilai $Q_{hitung} >$ dari pada Q_{tabel} pada taraf signifikansi 5% sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal itu berarti untuk kelompok siswa yang memiliki sikap demokrasi tinggi terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar PKn siswa antara kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model resolusi konflik dan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional. Pengujian **hipotesis keempat** yang berbunyi : terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran resolusi konflik dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model konvensional, pada siswa yang memiliki sikap demokrasi rendah, diperoleh rata-rata skor hasil belajar PKn kelompok siswa yang memiliki sikap demokrasi rendah dan mengikuti pembelajaran dengan model resolusi konflik (kelompok A1B2) adalah sebesar 22,77. Rata-rata skor hasil belajar PKn kelompok siswa yang memiliki sikap demokrasi rendah dan mengikuti pembelajaran dengan model konvensional (kelompok A2B2) adalah sebesar 30,32 sedangkan rata-rata jumlah kuadrat (RJKd) adalah sebesar 6,505.

Perhitungan dengan uji Tukey menunjukkan nilai Q_{hitung} sebesar 4,681, sedangkan nilai Q_{tabel} pada taraf signifikansi 0,05 sebesar 2,94. Hasil tersebut menunjukkan nilai $Q_{hitung} >$ dari pada Q_{tabel} pada taraf signifikansi 5% sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal itu berarti untuk kelompok siswa yang memiliki sikap demokrasi rendah terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar PKn siswa antara kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model resolusi konflik dan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional.

Bertolak dari hasil analisis data, penelitian ini telah menemukan bahwa model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran PKn, yaitu model belajar konvensional berpengaruh secara signifikan

terhadap hasil belajar PKn siswa kelas VII SMP Negeri 4 Negara. Secara keseluruhan, dengan tidak memperhatikan variable kendali berupa jenis kelamin, hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model belajar resolusi konflik lebih tinggi bila dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model belajar konvensional.

Temuan ini membuktikan bahwa model pembelajaran yang diterapkan oleh guru PKn dalam proses belajar mengajar, terutama model belajar resolusi konflik dapat meningkatkan sikap demokrasi siswa kelas VII SMP Negeri 4 Negara. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Mulyani, Sri (2011) dalam tesisnya yang berjudul : Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Demokratis Berbasis Kontekstual Terhadap Peningkatan Sikap Demokratis :Studi Quasi Experiment Pada Kelas PKN Sebagai Laboratorium Demokrasi di Kelas X SMAN 2 Garut. Sementara Lasmawan (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Perkembangan Model dan Materi PKn sekolah dasar berbasis nilai-nilai local dan berbantuan model resolusi konflik”, menyimpulkan bahwa : model resolusi konflik disamping mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn, juga telah mampu mengkondisikan siswa untuk belajar berdemokrasi dalam kehidupan kelas sebagaimana layaknya masyarakat riil.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh interaksi model resolusi konflik terhadap sikap demokrasi dan hasil belajar PKn, telah membuktikan bahwa model ini memiliki karakteristik yang relevan dengan PKn sebagai sebuah mata pelajaran wajib di sekolah dan bertujuan untuk menjadikan mereka lebih demokratis. Temuan ini juga sejalan dengan hasil temuan penelitian Rohsidin, (2010). Dengan judul tesis Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Masalah Dalam Meningkatkan Kecakapan Kewarganegaraan Siswa SMP Sebagai Warga Negara Demokratis.

Sebagaimana telah dideskripsikan pada kajian teoritis, bahwa pembelajaran PKn merupakan sebuah media dini kepada siswa untuk mampu menjadi warga Negara yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap

bangsa dan negaranya, maka logikanya seorang guru PKn harus mampu menanamkan konsep dan generalisasi tentang berbagai aspek yang dibutuhkan oleh siswa agar nantinya mereka jadi warga Negara yang sociotable. Guru PKn yang baik adalah guru yang mampu memberikan dan melatih seperangkat pengetahuan, percakapan, nilai moral dan etika kepada siswanya sehingga pada saat mereka menyelesaikan pendidikannya mampu memerankan dirinya sebagai warga masyarakat bangsa yang nasionalis. Untuk menjadikan siswa yang demikian, maka harus diawali dengan penanaman konsep dan generalisasi pendidikan bernegara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap keseluruhan hasil pengujian hipotesis penelitian, maka dapat disimpulkan : (1) terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model resolusi konflik dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model konvensional, (2) terdapat pengaruh interaksi antara penggunaan model pembelajaran resolusi konflik dan sikap demokrasi terhadap hasil belajar PKn pada siswa kelas VII SMP Negeri 4 Negara – Bali, (3) terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model resolusi konflik dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model konvensional, pada siswa yang memiliki sikap demokrasi tinggi, dan (4) terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model resolusi konflik dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model konvensional, pada siswa yang memiliki sikap demokrasi rendah.

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut maka dapat dirumuskan beberapa saran terkait dengan temuan penelitian ini, yaitu : (1) guru PKn seharusnya terus mengembangkan berbagai upaya dalam mensosialisasikan efektifitas model

pembelajaran resolusi konflik dalam pembelajaran di kelas, sehingga semakin banyak guru atau praktisi yang melakukan pengujian, yang pada akhirnya akan semakin memperbaiki kualitas pembelajaran PKn, (2) bagi Dinas Pendidikan Kabupaten / Kotamadya, temuan penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi atau bahan kajian untuk meningkatkan kualitas, proses dan produk pembelajaran PKn, khususnya pada jenjang SMP.

DAFTAR RUJUKAN

- Dantes, N (2006). Memperkuat Simpul Pendidikan Demokrasi dan Profesionalisme Guru (Makalah) disampaikan pada Seminar jurusan PKn Fakultas PIPS Undiksha, Singaraja : Jurusan PKn Undiksha.
- Dantes, N (2010). Model Pembelajaran Inovatif dan Penjaminan Mutu Pendidikan (makalah). Disampaikan pada seminar UJM Undiksha, Singaraja : UJM Undiksha.
- Dunia, I Nyoman, (2010). Pengaruh Model Pembelajaran Resolusi Konflik terhadap Prestasi Belajar PKn Ditinjau dari Pola Asuh Orang Tua. <http://pasca.undiksha.ac.id/e-jurnal/>, diunduh pada tanggal 10 Februari 2013
- Lasmawan, I Wayan (2007). Memperkuat Jati Diri dan Simpul Kenegaraan Melalui Pembelajaran PKn yang berbasis lokal genius. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Undiksha, vol. 3 Tahun 2007, Singaraja : JPP Undiksha.
- Lasmawan, I Wayan (2010). Model-model Pembelajaran Inovatif dalam Pendidikan IPS (bahan PLPG), Singaraja : Sekretariat PLPG Undiksha.
- Lasmawan, I Wayan (2013). Pengembangan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pendidikan IPS Berdasarkan Teori Rekonstruksi Sosial Vygotsky. (laporan penelitian), Singaraja : Lembaga Penelitian Undiksha.

